

**PRESS RELEASE**  
**THE 33<sup>rd</sup> GENERAL ASSEMBLY OF AIPA**  
**16-22 SEPTEMBER 2012**

---

1. Sidang Umum AIPA ke-33 digelar mulai tanggal 16-22 September 2012. Acara dihadiri oleh 393 peserta dengan 292 diantaranya adalah anggota parlemen dari 10 parlemen anggota AIPA dan 9 parlemen observer.
2. Sidang juga dihadiri tamu tuan rumah (*guest of the host*). Acara dihadiri oleh 7 Ketua Parlemen (Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia) dan 1 Wakil Ketua Parlemen (Vietnam dan Indonesia) dan pimpinan komisi di parlemennya. Sembilan parlemen observer yang hadir adalah Australia, Belarus, Canada, China, Parlemen Uni Eropa, India, Jepang, Federasi Rusia dan Republic of Korea.
3. Tamu tuan rumah yakni Sekretariat ASEAN, Pan African Parliament, Inter-Parliamentary Union, ASEAN-Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN), ASEAN Supreme Audit Institution (ASEAN SAI), DPD RI, dan Parlemen Timor Leste.
4. Sidang Umum dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia H Boediono dan juga dihadiri oleh Ketua ASEAN yang juga Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
5. Pada Sidang Umum AIPA ke-33, WAIPA melakukan diskusi mendalam dengan topik-topik terkait MDGs, akses perempuan ke kesehatan, ekonomi dan pendidikan serta peningkatan kapasitas perempuan di pedesaan.

6. Sidang Umum AIPA kali ini membahas sejumlah isu-isu dengan payung besar tema *Strengthening the Parliamentary Roles Towards ASEAN Community 2015* yakni:
  - Komite Politik: peningkatan *public awareness* dengan juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat madani dalam pembentukan komunitas ASEAN, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
  - Komite Ekonomi: pencucian uang, *green economy*, pengentasan kemiskinan, Usaha Kecil Menengah (UKM).
  - Komite Sosial: peningkatan *public awareness* dalam pengurangan dampak bencana serta isu *low carbon*.
  - Dan isu-isu ke organisasian dalam Komite Organisasi.
7. Sidang berjalan dengan perkembangan yang dinamis, dan diwarnai dengan partisipasi aktif dari para peserta maupun parlemen observer. Sidang umum menghasilkan 12 resolusi terkait agenda di komite-komite dan WAIPA, dan 11 resolusi di agenda organisasional.
8. AIPA juga menyepakati keputusan Sidang AIFOCOM yang digelar Juli, 2012, di Yogyakarta mengenai Rencana Aksi (*Plan of Action*) untuk Memerangi Kejahatan Narkoba dan juga pembentukan Technical Working Group untuk merumuskan langkah-langkah teknis bagi parlemen dalam memerangi Narkoba.
9. Sidang juga menyepakati kerjasama komprehensif dengan ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) terkait *green legislative agenda*, ASEAN Foundation dan Pan-African Parliament.
10. Hasil dari Komite-komite adalah sebagai berikut:  
**Komite Politik**
  - Menyadari aktualisasi konsep terkait upaya peningkatan *public awareness* dengan juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat madani dalam pembentukan komunitas ASEAN. Komite Politik juga menindaklanjuti rekomendasi Komite Eksekutif untuk

membahas agenda dan resolusi mengenai *Maintaining Peace and Stability in the Region*. Resolusi antara lain meminta AIPA untuk mendukung dan mendorong ASEAN, dalam semangat solidaritas, kemitraan, kebersamaan, mengintensifkan konsultasi dalam mewujudkan resolusi damai atas masalah kawasan sejalan dengan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (1976)*, *the ASEAN Charter (2008)*, dan *the Statement of ASEAN Foreign Ministers on ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea*.

- Komite Eksekutif memutuskan untuk tidak membahas isu Laut China Selatan secara mendetail, namun, diskusi tetap dilakukan dengan meningkatkan cakupan topik kepada isu yang lebih luas yakni *Maintaining Peace and Stability in the Region*. Keputusan tersebut disepakati oleh seluruh anggota Parlemen Negara AIPA setelah sebelumnya mendengarkan dan memperhatikan dinamika yang terjadi terkait pembahasan isu spesifik Laut China Selatan.
- Munculnya sikap dasar yang sama di kalangan ASEAN mengenai isu Laut China Selatan yakni dengan *Six-Point Principles on the South China Sea*, menandai awal yang baik dalam menciptakan stabilitas kawasan. AIPA kemudian secara bulat mengambil sikap untuk mendukung proses tersebut, dengan menyorotinya dalam perspektif yang lebih luas, yakni perdamaian dan stabilitas di kawasan.

### **Komite Ekonomi**

- Komite Ekonomi menyadari bahwa perkembangan ekonomi kawasan memiliki dampak negative termasuk dalam aspek tindak pidana ekonomi melalui pencucian uang. Oleh karenanya, parlemen negara-negara ASEAN menyepakati perlunya upaya konkret dalam legislasi dengan mendorong rezim anti pencucian uang, termasuk penguatan sistem dalam aspek moneter, perbankan dan finansial.
- AIPA juga mendukung inisiatif legislasi yang memiliki semangat pembangunan berkelanjutan dalam konsep *green economy*, serta

menegaskan komitmen saling membantu di ASEAN untuk mengentaskan kemiskinan.

- AIPA juga sepakat bahwa SMEs merupakan bagian penting dari ekonomi ASEAN, sehingga perlu upaya konkret mendukung perkembangan SMEs termasuk diantaranya melalui dukungan parlemen bagi akses finansial, teknologi, dan penguatan kapasitas dan daya saing.

### **Komite Sosial**

- AIPA menyepakati penguatan kerjasama regional bagi peningkatan sumber daya untuk tanggap darurat di Negara terdampak. Terkait isu *low carbon* dan *environment-friendly technology research*, AIPA mendorong upaya pengembangan diversifikasi energy untuk mengganti penggunaan energy minyak.

11. Dengan berakhirnya Sidang Umum AIPA ke-33, masa jabatan Ketua DPR RI sebagai Presiden AIPA periode 2011-2012 juga berakhir. Jabatan Presiden AIPA periode berikutnya dijabat oleh Brunei Darussalam. Sidang Umum juga menyepakati penyelenggaraan Sidang AIPA ke-34 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 2013.